

ABSTRAK

Isu hukum yang diangkat yaitu berkaitan dengan Pasal 4 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian, khususnya pada persyaratan administratif yang mewajibkan tanda kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional bagi pemohon Surat Keterangan Catatan Kepolisian. Maka hal tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum karena dapat menghambat akses masyarakat dalam mendapatkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian. Khususnya pada penelitian ini mengambil studi kasus di Kepolisian Sektor Mojo. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji implementasi Pasal 4 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian di Kepolisian Sektor Mojo. Dan akibat hukum bagi pemohon Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang tidak memiliki tanda kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menekankan pada implementasi Pasal 4 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian di Kepolisian Sektor Mojo yang berjalan secara optimal jika dilihat dari unsur komunikasi dan sumber dayanya. Namun, belum sepenuhnya efektif pada unsur disposisi dan struktur birokrasinya.

Kata Kunci: Implementasi Peraturan, Akibat Hukum, SKCK.

ABSTRACT

The legal issue raised is related to Article 4 of the Republic of Indonesia National Police Regulation Number 6 of 2023 concerning the Issuance of Police Record Certificates, specifically the administrative requirements that require active membership in the National Health Insurance for applicants for Police Record Certificates. Therefore, this has the potential to cause legal issues because it can hinder public access to obtaining Police Record Certificates. Specifically, this study took a case study in the Polsek Mojo. The purpose of this study is to examine the implementation of Article 4 of the Republic of Indonesia National Police Regulation Number 6 of 2023 concerning the Issuance of Police Record Certificates in the Polsek Mojo. And the legal consequences for applicants for Police Record Certificates who do not have National Health Insurance membership. The type of research used in this study is empirical legal research. The results of this study emphasize the implementation of Article 4 of the Republic of Indonesia National Police Regulation Number 6 of 2023 concerning the Issuance of Police Record Certificates in the Polsek Mojo, which is running optimally when viewed from the elements of communication and resources. However, it is not yet fully effective in terms of disposition and bureaucratic structure. As well as the implementation of policies that reflect adaptive practices and are oriented towards community service due to the absence of adverse legal consequences for applicants for Police Record Certificates who do not have a National Health Insurance membership certificate at the Polsek Mojo.

Keywords: Regulatory Implementation, Legal Consequences, SKCK.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN SAMPUL DALAM	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	13
1.5 Penelitian Terdahulu.....	13
1.6 Metode Penelitian.....	17
1.7 Sistematika Pembahasan	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23

2.1	Tinjauan Umum Implementasi Peraturan Perundang-undangan.....	23
2.2	Teori Implementasi Kebijakan.....	31
2.3	Tinjauan Umum Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).....	41
BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN		49
3.1	Implementasi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian di Kepolisian Sektor Mojo	49
3.2	Akibat Hukum Bagi Pemohon Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang Tidak Memiliki Tanda Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional di Kepolisian Sektor Mojo	67
BAB IV PENUTUP		81
4.1	Kesimpulan	81
4.2	Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	14
Tabel 2.1 Indikator Implementasi Kebijakan	39
Tabel 3.1 Data Pemohon SKCK di Polsek Mojo sebelum diundangkannya Perpolri Nomor 6 Tahun 2023	54
Tabel 3.2 Data Pemohon SKCK di Polsek Mojo setelah diundangkannya Perpolri Nomor 6 Tahun 2023	55
Tabel 3.3 Jenis Model Evaluasi	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Tingkat Polsek.....	61
Gambar 3.2 Kwitansi Pembayaran PNBPN Pembuatan SKCK	62
Gambar 3.3 Lembar Pertanyaan Pemohon SKCK	62
Gambar 3.4 Standar Pelayanan Penerbitan SKCK.....	63
Gambar 3.5 Proses Evaluasi Reformasi Birokrasi	79